

## Identifikasi Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan (Makassar, Parepare, Palopo, dan Luwu Timur) Tahun 2010–2024 Menggunakan *Fixed Effect Model*

Putri Nur Fausiah<sup>1\*</sup>, Abd Rahim<sup>2</sup>, Sri Astuty<sup>3</sup>, Abd Rajab<sup>4</sup>, Muhammad Syafri<sup>5</sup>

<sup>1\*,2,3,4,5</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Email: 162012310003@std.trisakti.ac.id<sup>1\*</sup>, syah.alam@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada empat wilayah, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur selama periode 2010–2024. Penelitian menggunakan data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Jumlah observasi panel adalah 60 (4 wilayah × 15 tahun). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, tingkat pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah penelitian cenderung belum bersifat inklusif sehingga belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya strategi pertumbuhan pro-poor dan peningkatan investasi sektor pendidikan serta kesehatan.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Kemiskinan; Indeks Pembangunan Manusia; Fixed Effect Model.

**Abstract.** This study aims to analyze the effect of economic growth, unemployment rate, and poverty rate on the Human Development Index (HDI) in South Sulawesi Province, focusing on four regions, namely Makassar City, Parepare City, Palopo City, and East Luwu Regency during the period 2010–2024. The study uses panel data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and analyzed using the Fixed Effect Model (FEM). The number of panel observations is 60 (4 regions × 15 years). The estimation results show that economic growth has a negative and significant effect on the HDI, the unemployment rate has a positive but insignificant effect, while the poverty rate has a negative and significant effect on the HDI. Simultaneously, all three independent variables have a significant effect on HDI. These findings indicate that economic growth in the study area tends to be non-inclusive, thus failing to improve the quality of human development. Policy implications emphasize the importance of pro-poor growth strategies and increased investment in the education and health sectors.

**Keywords:** Economic Growth; Unemployment; Poverty; Human Development Index; Fixed Effect Model.

## Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan pilar utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Secara strategis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Sapaat, 2020). Pada tingkat global, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena menempati peringkat ke-112 dari 193 negara pada tahun 2022. Posisi tersebut masih berada di bawah rata-rata dunia dan beberapa negara ASEAN (Kusnandar, 2022). Pada tingkat regional, Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dengan capaian IPM sebesar 75,18 pada tahun 2024 dan tetap berada dalam kategori pembangunan manusia “tinggi”. Capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 pada tahun 2024 memang menempatkan wilayah ini dalam kategori tinggi. Namun, angka agregat tersebut masih menyimpan disparitas pembangunan yang lebar antarwilayah. Kesenjangan terlihat antara Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan metropolitan dan wilayah lain yang berbasis sektor primer atau industri ekstraktif, seperti Kabupaten Luwu Timur.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi hasil pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi Selatan belum selalu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup yang merata pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi teori pembangunan manusia dan literatur empiris terkini. Variabel pertumbuhan ekonomi merujuk pada teori pertumbuhan endogen yang menekankan bahwa akumulasi modal manusia dan pengetahuan merupakan penggerak utama output nasional. Variabel tingkat pengangguran dipilih berdasarkan premis makroekonomi bahwa kegagalan pasar tenaga kerja dalam menyerap potensi manusia dapat menurunkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Sementara itu, variabel kemiskinan ditempatkan sebagai hambatan struktural utama dalam kerangka *Capability Approach* Amartya Sen. Kemiskinan membatasi kebebasan individu untuk mengakses layanan dasar dan dapat

menciptakan lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan. Literatur empiris di Indonesia menunjukkan bahwa interaksi antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan sering kali menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap IPM. Perbedaan tersebut bergantung pada karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Fenomena ini juga terlihat di Sulawesi Selatan, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan IPM yang sebanding. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan pemulihan pascapandemi, peningkatan IPM masih cenderung lambat dan belum merata. Ketimpangan pencapaian dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antarwilayah masih menjadi masalah utama (Irham, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di semua lapisan. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan. Pembangunan manusia berpusat pada penciptaan lingkungan masyarakat yang sehat, produktif, dan mampu mendukung kehidupan sehari-hari.

Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan agar potensi masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Secara sederhana, pembangunan dapat dipahami sebagai proses atau upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak terlepas dari berbagai persoalan yang kompleks. Proses ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, dan agama (Irham, 2024). Secara etimologis, istilah “modal manusia” terdiri atas kata “manusia” dan “modal”. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tanpa langsung habis dalam proses produksi. Dalam perspektif modal manusia, manusia dipandang sebagai aset penting yang memiliki nilai produktif, seperti halnya teknologi atau mesin. Manusia juga memiliki keterampilan dan kemampuan esensial dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, dan transaksi (Nurkholis, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu

wilayah. IPM dibentuk dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sebagai indikator komposit, IPM memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan manusia secara lebih menyeluruh. Namun, IPM belum sepenuhnya menangkap faktor eksternal, seperti deplesi sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan, yang juga dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat (Suparmoko, 2020). Penelitian mengenai determinan IPM telah banyak dilakukan. Studi Khadijah *et al.* (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh negatif terhadap IPM di wilayah tertentu apabila tidak disertai penguatan modal manusia. Sementara itu, Dwiningwarni *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap IPM, bergantung pada struktur pasar tenaga kerja daerah. Perbedaan temuan tersebut menjadi kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji kembali, terutama dalam melihat hubungan variabel makroekonomi terhadap pembangunan manusia pada wilayah yang lebih spesifik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap empat wilayah dengan capaian IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur selama periode 2010 sampai 2024. Fokus pada empat wilayah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan profil ekonomi daerah, seperti pusat jasa dan wilayah pertambangan, merespons pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai skor 0,713 dan menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata global sebesar 0,739. Berdasarkan laporan terhadap 193 negara, Indonesia menempati peringkat ke-112 di

dunia. Selain itu, capaian IPM Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Kusnandar, 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran strategis bagi Indonesia. IPM tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja pembangunan pemerintah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (Sapaat, 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah, tanpa harus memperhatikan apakah laju pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk, serta tanpa melihat perubahan struktur ekonomi. Pada umumnya, negara berkembang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan (Yusrya, 2023). Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai aktivitas yang dipengaruhi oleh tenaga kerja, metode produksi, teknologi modern, dan peningkatan output. Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian.

Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk perlu dikelola sebagai sumber daya produktif yang dapat mendukung pembangunan ekonomi (Fauzi & Endang Rostiana, 2022). Menurut Sukirno (1994) dalam Basrowi *et al.* (2018), pengangguran adalah kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja, umumnya berusia 15 sampai 64 tahun, memiliki keinginan untuk bekerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran terjadi ketika seseorang tersedia dan bersedia bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Sadono Sukirno menyatakan bahwa pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat. Penurunan pendapatan tersebut kemudian berdampak pada rendahnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan individu. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan risiko rendahnya capaian IPM karena masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Apabila pengangguran berada pada tingkat yang parah, kondisi tersebut dapat memicu perubahan sosial dan ekonomi yang menghambat peningkatan IPM dalam jangka menengah maupun jangka panjang (Desmiarti, 2019). Menurut Mankiw (2018), pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam perekonomian karena menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja potensial dapat berpartisipasi dalam kegiatan produksi. Kondisi ini terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang sesuai. Oleh karena itu, tingkat pengangguran menjadi indikator penting untuk menilai aktivitas ekonomi suatu negara serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Gunnar Myrdal melalui teori lingkaran kemiskinan menjelaskan bahwa keterbatasan modal bukan satu-satunya penyebab utama kemiskinan. Faktor yang lebih mendasar terletak pada rendahnya kualitas kesehatan, rendahnya asupan gizi, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Myrdal, kemiskinan berawal dari rendahnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada rendahnya konsumsi, khususnya konsumsi gizi. Kondisi ini menurunkan kualitas kesehatan dan produktivitas kerja.

Produktivitas yang rendah kemudian menyebabkan pendapatan tetap kecil, sehingga kemiskinan terus berlangsung secara berulang (Rahmawati *et al.*, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan manusia di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 hingga 2024. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 75,18, naik sebesar 0,58 poin atau 0,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,60. Selama periode 2020 sampai 2024, rata-rata pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan tercatat sebesar 0,71 persen per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut berhasil mempertahankan status pembangunan manusia pada kategori tinggi. Meskipun demikian, peningkatan IPM belum terjadi secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Beberapa wilayah, seperti Kota Makassar, menunjukkan capaian IPM

yang tinggi. Namun, masih terdapat sejumlah daerah dengan capaian IPM yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lambat. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan pencapaian pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antarwilayah di Sulawesi Selatan. Peningkatan pembangunan manusia tidak cukup hanya didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pembangunan manusia juga membutuhkan kebijakan yang mampu memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pada kenyataannya, IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih mengalami peningkatan yang relatif kecil. Meskipun distribusi pendapatan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat menghambat percepatan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di pusat-pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan; (2) bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap capaian pembangunan manusia secara parsial; dan (3) apakah tingkat kemiskinan masih menjadi faktor penghambat dominan terhadap IPM. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di empat wilayah sampel selama periode 2010 sampai 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan regional yang lebih inklusif.

## Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada analisis kausalitas makroekonomi. Lokasi penelitian mencakup empat wilayah strategis di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria utama pemilihan sampel adalah wilayah yang secara

konsisten menempati peringkat IPM tertinggi di tingkat provinsi, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan wilayah tersebut bertujuan untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan ekonomi yang kuat di pusat-pusat pertumbuhan telah bertransformasi menjadi pembangunan manusia yang inklusif.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010 sampai 2024. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas empat wilayah di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data panel. Data panel tersebut menggabungkan dimensi *time series* tahun 2010 sampai 2024 dan dimensi *cross-section* dari empat wilayah penelitian, sehingga menghasilkan 60 observasi. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Khusus untuk data tahun 2024, penelitian ini menggunakan angka tetap yang dipublikasikan pada akhir tahun 2024 untuk menjaga validitas hasil estimasi.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi, publikasi statistik, studi literatur, jurnal akademik, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Seluruh data kuantitatif yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

### Metode Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Teknik estimasi yang digunakan adalah *Least Square Dummy Variable* (LSDV) untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antarwilayah melalui intersep masing-masing daerah. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk memastikan validitas serta reliabilitas hasil analisis.

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

Dalam menentukan model estimasi yang tepat, penelitian ini melakukan beberapa pengujian. Pengujian tersebut meliputi uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	Std. Error	t- Statistik	P-Value
Konstanta (C)	90.1621	1.7047	52.8874	0,0000
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-0.1655	0.0628	-2.6342	0,0110
Tingkat Pengangguran (X2)	0.0466	0.1019	0.458	0.6488
Tingkat Kemiskinan (X3)	-1.4778	0.2294	-6.4414	0,0000
Efek Tetap Entitas (Fixed Effects)				
D_MAKASSAR	-1.621	1.1113	-1.4586	0.1506
D_PAREPARE	-4.3378	0.7709	-5.6265	0,0000
D_LUWU_TIMUR	-6.6174	0.604	-10.9557	0,0000
Statistik Model				
R-squared (Overall)	0.8929			
Adjusted R-squared	0.8808			
F-statistic	73.7162			
Prob(F-statistic)	0			
Jumlah Observasi (n)	60			

### Uji Chow

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Chow, diperoleh nilai F sebesar 40,774985 dengan probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Artinya,  $H_0$  ditolak, sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai *cross-section random* sebesar 121,324955 dengan probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Artinya,  $H_0$  ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Lagrange Multiplier (LM) tidak perlu dilakukan karena FEM telah terpilih sebagai model yang paling sesuai. Uji LM hanya diperlukan apabila hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas residual, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 3,605308 dengan probabilitas  $0,164 > 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antarvariabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Tingkat Kemiskinan (X3) memiliki nilai korelasi di bawah 0,85. Nilai korelasi tersebut masing-masing sebesar 0,313485, -0,024995, dan -0,054730. Karena seluruh nilai korelasi lebih kecil dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 berada di atas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Artinya, model telah memenuhi dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson, diperoleh nilai DW sebesar 0,5042. Nilai dL dan dU diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 60 observasi ( $n = 60$ ) dan jumlah variabel bebas sebanyak 3 variabel ( $k = 3$ ), sehingga diperoleh nilai dL sebesar 1,4797 dan nilai dU sebesar 1,6889. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai d lebih kecil daripada dL, yaitu  $0,5042 < 1,4797$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Durbin-Watson, model regresi terindikasi mengalami autokorelasi positif.

### Uji t

- 1) Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0110. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Artinya, Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 2) Variabel Tingkat Pengangguran (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6488. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Artinya, Tingkat Pengangguran (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- 3) Variabel Tingkat Kemiskinan (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Artinya, Tingkat Kemiskinan (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### Uji F

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Artinya, Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Tingkat Kemiskinan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil penelitian, nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0,880. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 88,0% variasi Indeks Pembangunan Manusia (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Tingkat Kemiskinan (X3). Sementara itu, sisanya sebesar 12,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### Hasil Estimasi dengan *Least Square Dummy Variable (LSDV)*

Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Model ini menggunakan variabel dummy wilayah untuk melihat perbedaan karakteristik antarwilayah dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada estimasi ini, Kota Palopo digunakan sebagai wilayah acuan. Periode analisis yang digunakan adalah tahun 2015 sampai 2024.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variabel Independen	TH	$\beta$	T hit	Prob.
Pertumbuhan Ekonomi	-	-0.165585	-2.634201	0.0110
Tingkat Pengangguran	+	0.046694	0.458013	0.6488
Tingkat Kemiskinan	-	-1.477817	-6.441406	0.0000
Dummy Makassar	-	-1.621079	-1.458665	0.1506
Dummy Parepare	-	-4.337836	-5.626507	0.0000
Dummy Lutim	-	-6.617485	-10.95573	0.0000
Konstanta				90.16215
n				60

Hasil estimasi variabel dummy menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan adanya perbedaan intersep pada beberapa daerah.

- 1) Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,165585 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 2) Koefisien tingkat pengangguran sebesar 0,046694 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,04%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 3) Koefisien tingkat kemiskinan sebesar -1,477817 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 1,47%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 4) Variabel dummy D1, yaitu Kota Makassar, memiliki koefisien sebesar -1,621079 dengan probabilitas 0,1506 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dummy Kota Makassar tidak signifikan secara statistik. Artinya, intersep Kota Makassar lebih rendah dibandingkan wilayah acuan, tetapi perbedaannya tidak signifikan.

- 5) Variabel dummy D2, yaitu Kota Parepare, memiliki koefisien sebesar -4,337836 dengan probabilitas 0,0000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dummy Kota Parepare signifikan secara statistik. Artinya, Kota Parepare memiliki capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan wilayah acuan.
- 6) Variabel dummy D3, yaitu Kabupaten Luwu Timur, memiliki koefisien sebesar -6,617485 dengan probabilitas 0,0000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dummy Kabupaten Luwu Timur signifikan secara statistik. Artinya, Kabupaten Luwu Timur memiliki capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan wilayah acuan.

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*, variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki koefisien sebesar -0,165585 dengan nilai probabilitas 0,0110 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y). Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 poin persentase akan menurunkan IPM sebesar 0,165585 poin, dengan asumsi

variabel lain berada dalam kondisi tetap. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara pertumbuhan ekonomi dan IPM. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi komponen utama IPM. Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di lokasi penelitian. Hasil ini tidak sejalan dengan teori ekonomi klasik, tetapi menguatkan adanya fenomena pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif di Sulawesi Selatan. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui struktur PDRB di empat wilayah sampel. Di Kabupaten Luwu Timur, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sektor pertambangan nikel yang bersifat padat modal dan ekstraktif. Sektor ini dapat menciptakan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan tenaga kerja ahli dari luar daerah. Akibatnya, pertumbuhan sektor tersebut belum memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan indikator pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal.

Di Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor perdagangan besar dan jasa keuangan juga menunjukkan kecenderungan serupa. Sektor-sektor tersebut membutuhkan kualifikasi sumber daya manusia yang spesifik. Akibatnya, angkatan kerja dengan pendidikan rendah cenderung terserap ke sektor informal dengan akses kesehatan dan perlindungan sosial yang terbatas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Lucas (1988), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa penguatan modal manusia yang merata dapat memperlebar ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, koefisien negatif dalam penelitian ini mencerminkan ketidaksesuaian antara percepatan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang diukur melalui dimensi IPM. Hasil ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen. Teori tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan output atau pendapatan daerah, tetapi juga oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan inovasi suatu wilayah. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh perbaikan pada aspek pembangunan manusia, peningkatan ekonomi belum tentu memberikan dampak positif terhadap IPM. Menurut Romer (1990), pertumbuhan ekonomi endogen bersumber dari proses internal perekonomian, terutama melalui akumulasi modal manusia, pengetahuan, dan inovasi teknologi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia berpotensi menciptakan pertumbuhan yang tidak inklusif dan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial. Rebelo (1991) juga menegaskan bahwa dalam model pertumbuhan endogen, kebijakan ekonomi yang tidak diarahkan pada investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, dan riset dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Pertumbuhan yang didominasi oleh sektor padat modal atau eksploitasi sumber daya alam hanya meningkatkan pendapatan agregat tanpa memperbaiki indikator pembangunan manusia. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan IPM karena peningkatan output tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup penduduk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan tidak ditopang oleh investasi modal manusia dapat menurunkan kualitas pembangunan manusia. Dalam teori pertumbuhan endogen, fenomena ini menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan tidak hanya berasal dari ekspansi produksi, tetapi juga dari peningkatan kemampuan manusia dalam menciptakan nilai tambah. Oleh sebab itu, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi positif terhadap IPM, pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan ekonomi pada penguatan kualitas sumber daya manusia.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran ( $X_2$ ) memiliki koefisien sebesar 0,046694 dengan nilai probabilitas 0,6488 >

0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran (X2) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y), tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Artinya, peningkatan tingkat pengangguran tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan IPM di wilayah penelitian. Secara teori, penurunan tingkat pengangguran seharusnya mampu mendorong peningkatan IPM karena masyarakat memiliki kesempatan kerja, pendapatan, dan akses ekonomi yang lebih baik. Namun, hasil penelitian ini tidak menunjukkan hubungan tersebut secara signifikan. Koefisien positif yang tidak signifikan pada empat wilayah pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Parepare, Palopo, dan Luwu Timur, dapat mengarah pada fenomena pengangguran terdidik (*educated unemployment*). Kota Makassar dan Kota Palopo merupakan pusat pendidikan regional. Pada wilayah tersebut, sebagian penganggur terbuka cenderung berasal dari lulusan perguruan tinggi yang sedang berada pada fase pengangguran friksional. Mereka biasanya masih mencari pekerjaan formal yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Karena kelompok ini telah memiliki kualitas modal manusia yang relatif tinggi, keberadaannya sebagai penganggur terbuka tidak secara langsung menurunkan capaian IPM. Bahkan, dari sisi dimensi pengetahuan, kelompok tersebut tetap berkontribusi terhadap capaian pendidikan dalam IPM. Selain itu, pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka bukan faktor utama yang menentukan perubahan IPM di wilayah penelitian. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh yang lebih kuat karena berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, dan meningkatkan standar hidup. Fenomena ini sejalan dengan teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker (1964) dan Schultz (1971). Dalam teori tersebut, pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga oleh investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Apabila kualitas sumber daya manusia tetap

terjaga melalui pendidikan dan akses layanan publik, peningkatan pengangguran tidak selalu menurunkan IPM secara langsung. Hal ini terjadi karena IPM mengukur kualitas hidup melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, bukan hanya tingkat penyerapan tenaga kerja. Hubungan positif antara pengangguran dan IPM juga dapat dijelaskan melalui proses transisi struktural. Menurut Kuznets (1971), dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan struktur dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa dapat meningkatkan pengangguran sementara. Kondisi ini terjadi karena tenaga kerja membutuhkan waktu untuk menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja baru. Namun, proses transisi tersebut juga dapat menunjukkan peningkatan kapasitas pendidikan dan ekonomi masyarakat yang dalam jangka panjang berpotensi mendorong peningkatan IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dwiningwarni *et al.* (2025), yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2013 sampai 2015.

### **Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel Tingkat Kemiskinan (X3) memiliki koefisien sebesar -1,477817 dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y). Artinya, setiap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 1,477817 poin, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi tetap. Variabel tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif paling dominan terhadap IPM dibandingkan variabel lainnya. Hal ini terlihat dari nilai koefisien sebesar -1,477817. Temuan ini memperkuat teori *Vicious Circle of Poverty* dari Nurkse (1953), yang menyatakan bahwa kemiskinan sistemik dapat membatasi kemampuan individu untuk berinvestasi pada gizi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga aspek tersebut merupakan unsur penting dalam pembentukan kualitas pembangunan manusia. Kemiskinan dapat

menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, serta standar hidup yang memadai. Keterbatasan tersebut kemudian menurunkan kualitas sumber daya manusia dan memperlambat peningkatan IPM. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula hambatan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih dominan dibandingkan tingkat pengangguran dalam memengaruhi IPM. Variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan karena sebagian penganggur di wilayah perkotaan, seperti Makassar dan Palopo, diduga berasal dari kelompok pengangguran terdidik. Kelompok ini secara pendidikan sudah memiliki kualitas modal manusia yang relatif baik, sehingga keberadaannya tidak langsung menurunkan nilai IPM secara statistik. Sebaliknya, kemiskinan berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup dasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan menjadi salah satu penghambat utama dalam pencapaian pembangunan manusia. Secara teoritis, hubungan negatif antara kemiskinan dan IPM sesuai dengan pandangan para ahli pembangunan yang menekankan bahwa kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Studi Upoyo Trisno dan Oktarina (2022) menunjukkan bahwa variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian ini, yaitu tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, dan

Kabupaten Luwu Timur. Hal ini terlihat dari hasil uji F yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Artinya, ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan perubahan IPM di empat wilayah penelitian. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,880 juga menunjukkan bahwa 88,0% variasi IPM dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Sisanya sebesar 12,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas belanja pemerintah, akses layanan pendidikan, akses layanan kesehatan, ketimpangan pendapatan, dan faktor kelembagaan daerah. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar -0,165585 dengan nilai probabilitas  $0,0110 < 0,05$ . Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 poin persentase justru menurunkan IPM sebesar 0,165585 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah penelitian belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kondisi ini dapat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu dan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara merata. Hasil tersebut menunjukkan adanya gejala pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif. Di Kabupaten Luwu Timur, misalnya, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sektor pertambangan yang bersifat padat modal dan ekstraktif. Sektor tersebut dapat meningkatkan nilai output daerah, tetapi belum tentu menyerap banyak tenaga kerja lokal atau meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Di Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor perdagangan besar dan jasa keuangan juga membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung terserap ke sektor informal yang memiliki perlindungan sosial terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khadijah *et al.* (2022), yang menemukan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh negatif terhadap IPM apabila tidak diikuti oleh penguatan modal manusia. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan Romer (1990) dan Rebelo (1991), yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh investasi pada pendidikan, kesehatan, pengetahuan, dan inovasi agar mampu meningkatkan pembangunan manusia. Tingkat pengangguran dalam penelitian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Hasil estimasi menunjukkan koefisien sebesar 0,046694 dengan nilai probabilitas 0,6488 > 0,05. Artinya, tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan IPM di wilayah penelitian. Secara teori, pengangguran seharusnya berdampak negatif terhadap IPM karena dapat menurunkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang berbeda dan tidak signifikan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui fenomena pengangguran terdidik di wilayah perkotaan, khususnya Kota Makassar dan Kota Palopo sebagai pusat pendidikan regional.

Pengangguran terdidik terjadi ketika individu yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi belum terserap dalam pasar kerja karena masih mencari pekerjaan formal yang sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikannya. Kelompok ini sudah memiliki modal manusia yang baik, terutama pada dimensi pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan mereka sebagai penganggur terbuka tidak langsung menurunkan capaian IPM secara statistik. Selain itu, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pengangguran bukan faktor paling dominan dalam menentukan IPM di wilayah penelitian. Variabel kemiskinan lebih kuat pengaruhnya karena berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwiningwarni *et al.* (2025), yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil ini juga sesuai dengan teori modal manusia Becker (1964) dan Schultz (1971), yang menekankan

bahwa kualitas manusia tidak hanya ditentukan oleh status bekerja atau tidak bekerja, tetapi juga oleh investasi pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil estimasi menunjukkan koefisien sebesar -1,477817 dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Artinya, setiap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 1,477817 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh paling besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan hambatan utama dalam peningkatan pembangunan manusia di wilayah penelitian. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan yang layak, mengakses layanan kesehatan, dan meningkatkan taraf hidup. Pengaruh negatif kemiskinan terhadap IPM dapat dijelaskan melalui teori *Vicious Circle of Poverty* dari Nurkse (1953).

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan membuat masyarakat sulit berinvestasi pada gizi, pendidikan, dan kesehatan. Rendahnya kualitas gizi dan pendidikan akan menurunkan produktivitas kerja. Produktivitas yang rendah kemudian menyebabkan pendapatan tetap kecil, sehingga kemiskinan terus berlangsung secara berulang. Dalam penelitian ini, kemiskinan terbukti menjadi faktor yang paling kuat dalam menurunkan IPM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Upoyo Trisno dan Oktarina (2022), yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini juga sejalan dengan Rahmawati *et al.* (2022), yang menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hasil estimasi variabel dummy wilayah, terdapat perbedaan capaian IPM antarwilayah. Kota Palopo digunakan sebagai wilayah acuan. Dummy Kota Makassar memiliki koefisien sebesar -1,621079 dengan probabilitas  $0,1506 > 0,05$ . Artinya, capaian IPM Kota Makassar lebih rendah dibandingkan Kota Palopo, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, Kota Parepare

memiliki koefisien sebesar  $-4,337836$  dengan probabilitas  $0,0000 < 0,05$ , sedangkan Kabupaten Luwu Timur memiliki koefisien sebesar  $-6,617485$  dengan probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Parepare dan Kabupaten Luwu Timur memiliki perbedaan capaian IPM yang signifikan dibandingkan Kota Palopo. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi, struktur wilayah, dan akses terhadap layanan dasar dapat memengaruhi capaian pembangunan manusia di masing-masing daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran perlu tetap diperhatikan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja terdidik. Namun, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama karena variabel ini terbukti memiliki pengaruh negatif paling dominan terhadap IPM. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pengurangan kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mendorong sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Upaya tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di empat pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan. Secara parsial, penelitian ini menemukan adanya paradoks pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan output daerah belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia

secara merata. Tingkat kemiskinan menjadi faktor penghambat paling dominan karena memiliki koefisien negatif dan signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Sementara itu, TPT berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Hasil ini mencerminkan adanya karakteristik pengangguran terdidik di wilayah perkotaan, yaitu individu yang memiliki modal manusia relatif tinggi, tetapi belum terserap secara optimal dalam pasar kerja formal. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Penggunaan unit *cross-section* yang terbatas pada empat wilayah berisiko membatasi generalisasi temuan untuk seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Model regresi data panel yang digunakan juga berpotensi mengalami *omitted variable bias* karena belum memasukkan variabel kebijakan fiskal, seperti belanja publik, serta variabel ketimpangan pendapatan, seperti *Gini Ratio*. Kedua variabel tersebut secara teoretis penting dalam menjelaskan dinamika IPM. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kemungkinan masalah endogenitas dan jeda struktural, karena pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas manusia tidak selalu terjadi secara langsung dan dapat memiliki hubungan timbal balik.

Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode estimasi yang lebih kuat, seperti *Generalized Method of Moments* (GMM) atau *Spatial Panel Data*, agar mampu menangkap efek interaksi antarwilayah dan mengatasi masalah autokorelasi secara lebih efisien. Saran kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu mengarahkan prioritas pembangunan pada transformasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kebijakan ekonomi tidak cukup hanya mendorong peningkatan output daerah, tetapi juga harus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif padat modal dan memperkuat sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara lebih besar. Program pengentasan kemiskinan juga perlu dijadikan

prioritas utama karena kemiskinan terbukti menjadi faktor yang paling kuat dalam menurunkan IPM. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui integrasi bantuan sosial, peningkatan akses layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, dan penguatan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah daerah perlu menelaraskan investasi fisik dengan pengembangan modal manusia melalui pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja regional. Langkah ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dikonversi menjadi peningkatan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Basrowi, Yuliana, S., Prayogo, A. D., Liana, J. E., Andriansyah, M., & Astridinata, I. K. (2018). *Pengangguran: Perspektif teoretis*. OSF, 1–14.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Desmiarti, S. (2019). Pengaruh PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Dwiningwarni, S. S., Suprijati, J., Yuli, S., & Andari, D. (2025). Dampak kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi*, 3. In press.
- Fauzi, M. H. F., & Rostiana, E. (2022). *Efek human capital dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN*. Universitas Pasundan Bandung.
- Irham, F. M. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 15–21. <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.29272>.
- Khadijah, S., Saharuddin, S., Anwar, K., & Murtala, M. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i1.8899>.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia naik pada 2022*. Databoks.
- Kuznets, S. (1971). *Economic growth of nations: Total output and production structure*. Harvard University Press.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Nurkholis, A. (2018). *Teori pembangunan sumber daya manusia: Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory*. INA-Rxiv, Center for Open Science, 3–5.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum regional (UMR), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2017–2021: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19–31. <https://doi.org/10.33369/convergenceje.p.v4i1.23358>.
- Rebelo, S. (1991). Long-run policy analysis and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 99(3), 500–521.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- Sapaat, T. M. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005–2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 45–56.

- Schultz, T. W. (1971). *Investment in human capital*. Free Press.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Upoyo Trisno, T., & Oktarina, Y. (2022). Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016–2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8).
- Yusrya, N. (2023). Analisis pengaruh angka harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan perempuan sebagai tenaga profesional terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2010–2022. *Jurnal Ekonomi*, 1, 1–23.
- Zakaria, R. (2018). *Pengaruh tingkat jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010–2016*. DSpace UII.